

**STRATEGI PERTAHANAN KELOMPOK *MARITIME GUERILLA WAR ABU SAYYAF (2012-2017) DI TENGAH INTENSITAS KERJASAMA COUNTER-PIRACY***

**Nabila Azizura Rosadi**

Departemen Ilmu Hubungan Internasional  
Universitas Airlangga

**Abstrak**

Sebagai Organisasi *Maritime Guerilla War* (MGW), Kelompok Abu Sayyaf (KAS) sering melakukan aksi kriminalitas maritim di Laut Sulawesi-Sulu meskipun mendapat banyak tekanan dari berbagai kekuatan militer. Tekanan tersebut diberikan baik oleh pemerintah Filipina maupun berbagai kerjasama regional dan internasional untuk menumpas aksi perompakan dan kriminalitas maritim lainnya. Mengapa terjadi demikian? Strategi apakah yang digunakan oleh KAS? Melalui teori insurgensi, konflik dalam negeri dan kerjasama *counter piracy*. Kemudian dengan melihat aksi-aksi MGW, konflik yang berkelanjutan, globalisasi, dan medan penyerangan, penelitian eksplanatif ini memperoleh penjelasan bahwa ada keterbatasan kerjasama *counter piracy* yang kemudian dimanfaatkan oleh KAS untuk mengembangkan dan mengadaptasikan strategi penyerangannya. Dari instrumen-instrumen di atas juga diperoleh kesimpulan bahwa aksi-aksi KAS dipengaruhi kerjasama melawan perompakan. Perbedaan taktik, sasaran, dan peningkatan jumlah dari aksi KAS merupakan bentuk adaptasi KAS terhadap tekanan domestik dan internasional untuk tetap eksis dalam menjalankan aksi-aksinya.

**Kata Kunci:** Kelompok Abu Sayyaf, Kerjasama melawan Perompakan, *Maritime Guerilla War*, Peningkatan, Strategi.

*As the Maritime Guerilla War (MGW) Organization, the Abu Sayyaf (KAS) group often carries out maritime crime in the Sulawesi-Sulu Sea despite heavy pressure from various military forces. This pressure was given both by the Philippine government and various regional and international cooperations to against piracy and other maritime crimes. Why did this happen? What strategies are used by KAS? Through the theory of insurgency, domestic conflict and counter piracy cooperation. Then by looking at MGW actions, ongoing conflict, globalization and the field of attack this explanatory research was explained that there were limitations to counter piracy cooperation which KAS then used to develop and adapt its attack strategies. From the above instruments, it was also concluded that the actions of the KAS were influenced by cooperation against piracy. Differences in tactics, targets, and an increase in the number of KAS actions are a form of adaptation of KAS toward domestic and international pressure to remain in carrying out their actions.*

**Keywords:** *Abu Sayyaf Group, Collaboration against Piracy, Enhancement, Maritime Guerilla War, Strategy.*

Maraknya aksi perompakan ataupun terorisme maritim di perairan Asia Tenggara menyebabkan keamanan maritim menjadi isu pokok di semua sektor perhubungan antar negara melalui laut. Peningkatan kriminalitas maritim akhir-akhir ini terjadi di perairan perbatasan antara negara Filipina, Indonesia dan Malaysia. Kelompok yang menginisiasi pergerakan di wilayah tersebut mayoritas didominasi oleh Kelompok Abu Sayyaf (KAS) yang merupakan kelompok gerilya dengan kemampuan menyerang di perairan. KAS berasal dari bahasa Arab, yakni “Abu Sayyaf” yang berarti “ayah dari pendekar pedang”. Kelompok tersebut merupakan salah satu dari beberapa kelompok pemberontakan Bangsa Moro<sup>1</sup>. Penyebutan Bangsa Moro sendiri dilakukan oleh bangsa Spanyol yang merujuk pada kelompok pemberontak pemerintah, khususnya Muslim Filipina di era penjajahan. Gerakan pemberontakan tersebut pada akhirnya meluas menciptakan berbagai kelompok pemberontak seperti KAS dan aktivitasnya yang tetap eksis hingga saat ini. KAS tidak mengalami kesulitan untuk mengadopsi strategi peperangan di perairan atau perompakan karena mayoritas dari mereka berprofesi sebagai nelayan yang berdomisili di Basilan, Sulu dan Tawi-tawi (Banlaoi, 2008: 65). Penyerangan dan Kriminalitas oleh KAS di perairan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Usaha mengatasi perompakan di perairan selatan Filipina sebenarnya sudah mulai dibicarakan sejak tahun 2001, yakni oleh Presiden Gloria dan Megawati ketika mendiskusikan perjanjian bilateral terkait meningkatnya kegiatan MGW oleh KAS (Solari, 2008). Berlanjut di tahun 2005 Indonesia dan Filipina menyetujui kerjasama keamanan bilateral untuk wilayah Sulawesi Utara, Borneo, Selatan Mindanao dan Maluku Utara yang wilayah tersebut berada di Laut Sulawesi (Solari, 2008). Tahun 2006, Amerika Serikat (AS), Filipina, Indonesia, Malaysia dan negara regional lainnya mengadakan latihan keamanan maritim bersama di Laut Phuket, Thailand dalam *event* “*Southeast Asia Cooperation and Training (SEACAT)*”. Langkah tersebut diambil sebagai usaha meningkatkan kapabilitas keamanan dalam mengatasi aksi kriminalitas maritim (Solari, 2008). Tahun 2016, Malaysia, Filipina dan Indonesia (Maphilindo) membentuk *Trilateral Cooperative Arrangement (TCA)* (BBC Indonesia, 2017). Perjanjian trilateral tersebut disahkan setelah dua bulan sebelumnya telah diadakan pertemuan untuk membahas keadaan keamanan maritim masing-masing negara, yakni 14 Juli 2016 yang terdiri dari pengamanan patroli berlapis, *joint patrol*, *coordinated patrol* dan *convoy patrol*. Ketiga patroli tersebut merupakan rangkaian dari operasi *Sulawesi-Sulu Sea Patrol (SSSP)*, yakni bentuk sah TCA oleh Maphilindo. Dengan jejak panjang yang melahirkan perjanjian tersebut seharusnya perompakan KAS mampu direduksi pada tahun 2017, namun KAS tetap eksis dengan berbagai aksinya.

### **Konflik Berkepanjangan dan Globalisasi sebagai Faktor Meningkatnya MGW oleh KAS**

Pergerakan awal KAS terjadi pada saat mereka melakukan peledakan di bulan Agustus 1991 terhadap Kapal MV Doulos yang membawa para misionaris ke kota Zamboanga. Penambahan militer yang semakin meningkat diadakan karena musuh yang dihadapi oleh KAS adalah militer pemerintah (Moller, 2009: 12). Pergerakan KAS yang oleh pemerintah Filipina telah disebut teroris memiliki dinamika pola penyerangan yang cukup unik. Di sini peneliti tetap menjelaskan KAS sebagai kelompok insurgen, karena meskipun dalam penjelasan di atas telah disebutkan bahwa KAS di periode waktu tertentu melakukan pemboman dan di waktu lain melakukan penculikan, hal tersebut

---

<sup>1</sup> Bangsa Moro diidentikkan untuk menyebut masyarakat Filipina Selatan yang beragama Islam. Penyebutan tersebut berasal dari penjajah Spanyol yang merujuk pada kelompok-kelompok pemberontakan semasa penjajahan. Dalam peneitian ini, penulis menggunakan Bangsa Moro untuk menyebut masyarakat Islam di Filipina Selatan.

tak lain dikarenakan latar belakangnya sebagai kelompok insurgen yang ingin memperoleh hak atas penentuan nasib Muslim sendiri di Filipina.

### **Konflik Berkepanjangan sebagai Faktor Meningkatnya MGW oleh KAS**

Konflik berkepanjangan yang semakin memperburuk keadaan di Filipina Selatan bukan tidak berusaha diatasi pemerintah Filipina, namun lebih pada kegagalan yang selalu ditemui dalam mencapai kesepakatan damai, baik dengan MNLF ataupun MILF. Final dari perjanjian perdamaian pada akhirnya ditandatangani oleh MILF dan Pemerintah Filipina setelah 32 negosiasi yang dilakukan, tepatnya pada 7 Oktober 2012. Perjanjian ini untuk mengesahkan *Bangsamoro Autonomous Region* (BAR). Perjanjian berikutnya yang ditandatangani antara kedua pihak adalah pada 27 Maret 2014 yang berisi lampiran mengenai bagi hasil, eksploitasi sumber daya, pemerataan kesejahteraan serta pembentukan angkatan polisi lokal untuk BAR. *Bangsamoro Basic Law* (BBL) yang diharapkan telah disahkan di tahun 2015 ternyata tertunda karena adanya bentrokan antar kedua pihak pada 25 Januari 2015 di Mamasapano, Mungindanao. Dari insiden tersebut korban lebih banyak dari pihak pemerintah. Empat hari setelah peristiwa tersebut, kedua pihak mengadakan pertemuan lagi untuk menyatakan komitmennya kembali pada perdamaian. Pihak pemerintah berharap dapat melucuti bahkan menonaktifkan gerakan-gerakan pemberontakan (Heydarian, 2015: 5). Perjanjian tersebut pada nyatanya hanya berhasil menghentikan tindakan dari MILF sebagai kelompok Islamis terbesar di Filipina, gerakan-gerakan pemberontakan kecil seperti KAS tetap melancarkan serangan-serangannya, bahkan setelah banyaknya penangkapan dan pembunuhan terhadap pemimpin-pemimpin KAS oleh kepolisian Filipina (Strachan, 2015: 8).

Terdapat tiga faktor pendorong utama langgengnya konflik di wilayah Filipina Selatan, yakni Basis ideologi KAS, *Shadow Economy*, dan Elit Politik. Melalui basis ideologi, Cita-cita awal dibentuknya KAS oleh Abdurajak diakui menjadi penyebab utama eksisnya KAS di tengah tren pemberantasan terorisme dan perompakan di Asia Tenggara. Keinginan Abdurajak Janjalani untuk menciptakan negara Islam yang independen dari pemerintahan Filipina di Filipina Selatan melalui pergerakan KAS menjadi tantangan terbesar untuk bersatunya MILF dengan kelompok militan lain dalam membentuk wilayah otonomi Bangsa Moro (Banlaoi, 2005: 67). Faktor lain yang memperpanjang konflik di selatan Filipina sejak tahun 2012 hingga 2017 adalah suburnya praktik *Shadow Economies* (SE) di wilayah tersebut. Praktik SE yang marak terjadi di Bangsa Moro biasanya berupa obat-obatan terlarang, senjata ilegal, perdagangan ilegal lintas batas dan penculikan untuk tebusan. Berdasarkan laporan dari *Bangsa Moro Conflict Alert* (BCA), perjanjian damai yang terus tertunda menimbulkan suasana nyaman bagi kelompok dan klan terkuat di Bangsa Moro untuk menguasai SE. Sumber daya untuk melancarkan aksi-aksi kriminal menjadi lebih mudah didapat, bahkan tidak memerlukan pajak tambahan sebagaimana peraturan pemerintahan mengenai perdagangan barang-barang tersebut (International Alert, 2014). Di tingkat pemerintahan, praktik SE menyebabkan perhitungan keuntungan dan pajak tidak masuk dalam pemerintahan. Bangsa Moro dalam hal tersebut merasa diuntungkan, karena dalam transaksinya mereka mengambil nilai ekonomi barang tersebut sepenuhnya dan bahkan barang yang mereka terima belum pasti mampu diberikan oleh pemerintah. Hal kedua yang membahayakan pemerintahan melalui praktik SE adalah hilangnya kebutuhan urgen akan pemilihan wakil rakyat di wilayah Bangsa Moro. Praktik SE akan menimbulkan hubungan patronase antar pemilik sumber daya dengan masyarakat (Strachan, 2015: 15).

Keterlibatan elit politik lokal juga sangat berpengaruh pada konflik yang berkepanjangan. Pertanyaan mengenai, “mengapa tingkat kriminalitas tidak juga menurun, padahal sudah terbentuk wilayah pemerintahan lokal ARMM?”. Hal tersebut tak lain karena elit politik turut terlibat dalam praktik kriminal, bahkan kriminalitas menjadi mudah ketika antar pemerintah dan aktor kriminal memiliki hubungan saling ketergantungan. Dalam kasus KAS, aksi penculikan untuk tebusan merupakan salah satu aksi kriminal yang menguntungkan otoritas lokal. Bahkan menurut Gutierrez, menjelang pemilihan umum, kasus penculikan untuk tebusan cenderung semakin meningkat karena dari sanalah otoritas memperoleh dana untuk melakukan kampanye yang berujung pada praktik patronase. Elit politik yang sudah terpilih juga menyadari bahwa dukungan penduduk lokal terhadap kelompok militan Islam cukuplah tinggi, mengingat hasil dari aksi kriminalitas sebagian digunakan untuk pembangunan fasilitas umum Bangsa Moro. Hal tersebut kemudian berujung pada semakin eratnya hubungan dan dukungan antar elit dengan kelompok militan di Filipina Selatan (Banlaoi, 2005: 70). Tingkat efektivitas untuk melakukan penculikan dalam KAS sangatlah tinggi, disamping ia memperoleh dukungan otoritas lokal, KAS juga sudah memiliki basis tetap, yakni di Basilan dan beberapa wilayah di Mindanao Selatan yang membuatnya lebih mudah untuk beroperasi (Strachan, 2015: 17-19).

### **Faktor Globalisasi sebagai Pendorong Kriminalitas Maritim KAS**

Inter-koneksi KAS dengan kelompok-kelompok kriminal di Filipina lainnya tidak bisa dipungkiri memberikan kesulitan bagi pihak berwenang untuk mengusut pelaku kriminal kelompok tertentu. Secara umum telah diketahui, bahwa kelompok kriminal di Filipina tidak hanya terdiri dari MNLF, MILF dan KAS, kelompok-kelompok kecil berbasis kesukuan yang berada di wilayah ARMM juga cukup banyak dan operasi mereka juga tidak jauh berbeda dengan taktik KAS di perairan baik dengan megebom kapal-kapal atau menculik sandera. Fenomena ini terlihat unik apabila belum memahami teknik manajemen keanggotaan KAS dan kelompok-kelompok kriminal kecil di Filipina. Satu individu diyakini bisa tergabung di dalam lebih dari satu kelompok, hal tersebut terbukti dari banyaknya data yang tidak sama dalam menyajikan jumlah insiden yang diakibatkan oleh KAS serta pengakuan dari saksi-saksi sendiri mengenai cara kerja keanggotaan kelompok kriminal di wilayah Bangsa Moro (Gerdes, 2014: 273). Selain manajemen keanggotaan KAS, cara belajar KAS yang memberikan keleluasaan bagi KAS mengembangkan potensinya di Filipina Selatan juga menjadi hambatan selanjutnya bagi pihak berwenang dalam mengatasi aksi-aksi KAS. Cara belajar KAS dikategorikan oleh Gerdes et al, ke dalam tiga cara, yakni melalui pengamatan, pembelajaran formal dan praktik secara langsung (Gerdes, 2018: 280). Secara umum, Gerdes menjelaskan bahwa cara tersebut tidak hanya digunakan oleh KAS, namun juga oleh kelompok kriminalitas non negara lainnya.

Kategori pembelajaran pertama adalah melalui pengamatan. Dalam teknik ini, internet sangat mempengaruhi. Analisa Pundits dalam Gerdes menunjukkan bahwa melalui internet didapat pola pembelajaran mandiri. Dengan adanya sumber daya online, mereka lebih mudah mengakses video bagaimana cara merakit bom. Metode pembelajaran kedua adalah melalui pengadaan kelas pelatihan untuk anggota jihadis. Metode ini sudah dilakukan oleh KAS sejak awal berdirinya KAS. Kelas pelatihan yang diadakan tidak jarang menandatangani pelatih dari luar organisasi. Sebagai contoh nyata, hubungan KAS dengan Al-Qaeda, MILF, dan JI yang saling bertukar tentor perang dan bertukar pengetahuan mengenai taktik penyerangan masing-masing kelompok. Metode yang terakhir, yakni dengan pembelajaran melalui praktik. Gerdes et al menyebutkan bahwa metode pembelajaran yang paling tepat bagi KAS adalah melalui praktik dan studi formal. Geografis yang mendukung

untuk melakukan praktik bahkan aksi secara langsung sangat efektif bagi anggota KAS untuk mengakselerasi kemampuannya. Sejalan dengan fakta tersebut, Brian A. Jackson berpendapat bahwa skill organisasi kriminal akan mudah diimplementasikan dengan pola komunikasi tatap muka secara langsung karena penyampaian hal yang bersifat taktik rahasia akan sangat susah atau bahkan tidak mungkin untuk disampaikan secara virtual (Gerdes, 2018: 283).

### **Komparasi Intensitas Aksi MGW KAS dengan Kerjasama Melawan Perompakan**

Diawali dengan perjanjian antara Filipina dan Indonesia di tahun 2005. Perjanjian tersebut mencakup empat poin yang salah satunya berupa kerjasama keamanan bilateral di wilayah Sulawesi Utara, Borneo, Mindanao Selatan dan Maluku Utara. Keempat wilayah tersebut sama-sama berada di Laut Sulawesi. Tahun berikutnya, Indonesia, Malaysia, Filipina, AS dan negara-negara ASEAN lainnya mengadakan SEACAT. Negara peserta dalam pelatihan tersebut saling berbagi informasi dan taktik mengenai perkembangan kriminalitas maritim di titik-titik rawan perairan Asia Tenggara, termasuk di Laut Sulawesi-Sulu. Setelah tahun 2006 tidak ada lagi pembahasan intens antar ketiga negara mengenai isu keamanan perairan Sulawesi-Sulu dari perompak. Di luar kerjasama Maphilindo, Filipina juga melakukan berbagai perjanjian militer dengan AS, baik berupa dana, pasukan ataupun persenjataan untuk menumpas KAS. Di mulai tahun 2002, AS mengirim 660 pasukan ke daratan Filipina. Pada saat itu AS menggunakan istilah latihan bersama, karena berdasarkan peraturan Filipina yang melarang kehadiran kekuatan asing di Filipina. Namun pada kenyataannya apabila tentara AS mendapat serangan, mereka boleh melindungi diri dengan senjata api (Febrica, 2014: 67). Kemudian hingga tahun 2005, tentara AS masih eksis di Filipina untuk melawan KAS yang mengakibatkan tertangkapnya beberapa pemimpin dan sejumlah pasukan KAS. Pada tahun 2012, kerjasama antar kedua negara meningkat dengan AS yang mengirim pesawat jet dan sistem radar laut kepada Angkatan Laut Filipina.

Hubungan Filipina-Indonesia sebelumnya sempat memanas melalui isu perbatasan. Melalui persengketaan di isu tersebut, kedua negara lebih memilih untuk melakukan kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Dimulai sejak tahun 1986, kedua negara membentuk Patroli Gabungan Filipina-Indonesia (CORPAT PHILINDO) yang bekerjasama untuk merespon perompakan dan aksi ilegal lainnya di laut. Kegiatan kerjasama tersebut termasuk pelatihan dan penyelamatan korban bersama. Berikutnya pada tahun 1989, kedua negara mulai mengadakan pengamanan melalui udara di selatan Filipina dan utara Sulawesi. Pada 27 Agustus tahun 1997, menteri pertahanan dan keamanan Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian kerjasama yang meliputi latihan militer bersama, operasi patroli di perbatasan dan pertukaran informasi (Febrica, 2014: 69). Indonesia dan Filipina kemudian menyetujui bahwa mereka berhak melewati kapalnya di luar perbatasannya ketika sedang melakukan perburuan terhadap pelaku kriminal maritim (Febrica, 2014: 72). Hal tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa kerjasama keamanan maritim antar dua negara cukup kuat yang didasari sikap saling percaya. Setelah Filipina-Indonesia, Malaysia pun turut dalam pengamanan teritori di perbatasan tiga negara, yakni dengan membentuk *The Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-The Philippines East ASEAN Growth Area* (BIMP-EAGA) pada tahun 1994. Tahun 2007, BIMP-EAGA memfokuskan kerjasama pada isu-isu jalur lalu lintas laut yang krusial bagi keempat negara tersebut, dalam hal ini Laut Sulawesi-Sulu juga masuk dalam pembahasan.

Puncak dari perjalanan panjang perjanjian bilateral dan multilateral tersebut adalah perjanjian trilateral antara Malaysia, Filipina dan Indonesia. Berawal dari komitmen yang dibuat sejak tahun 2012 dan telah dibicarakan sejak terbentuknya kerjasama bilateral antara Indonesia dan Filipina di

tahun 1986. Maphilindo pada akhirnya meresmikan SSSP di tahun 2017. Respon puncak ini dilatarbelakangi dengan aksi KAS yang jumlahnya berada pada titik tertinggi di tahun 2016 pada bulan Maret hingga April dengan menyerang 3 kapal tug dan menahan 18 anggota kru yang 14 dari ke 18 anggota tersebut berkewarganegaraan Indonesia. Penerapan patroli udara yang merupakan salah satu agenda dari kerjasama tersebut baru beroperasi pada bulan Oktober 2017. AS dan Jepang adalah aktor luar yang paling signifikan perannya dalam SSSP. Jepang menyediakan perahu patroli berukuran sedang sebanyak 12, perahu kecil berkecepatan tinggi sebanyak 15 dan setuju untuk mendanai 11 stasiun radar di perairan Sulawesi-Sulu. Inisiatif berikutnya adalah dari AS yang di bawah pemerintahan Obama memberikan pendanaan, pelatihan, pesawat pengintai, peralatan radar dan kapal pengawas pantai. Di bawah pemerintahan Trump, AS memberikan perpanjangan pendanaan hingga 2024.

Tabel 3.1. *Timeline Aksi KAS 2012-2017*

Tahun	Jenis Aksi	Jumlah Aksi	Banyak Korban
2012	Penyanderaan	1	3
	Pembunuhan	1	6 terbunuh, 27 terluka
2013	Bentrok militer Filipina	1	7 militer terbunuh
	Pembunuhan	1	1
2014	Penyanderaan	1	1
	Penyanderaan	4	9
2015	Pembunuhan	1	21
	Penyanderaan	3	9
2016	Pembunuhan	2	2
	Bentrok militer Filipina	10 hari	18 KAS terbunuh
	Penyanderaan	12	47
2017	Bentrok militer Filipina	7	15 KAS terbunuh, 18 militer terbunuh dan 50 militer terluka
	Pembunuhan	2	2
	Perampokan	2	-
2017	Bentrok militer Filipina	4	17 KAS terbunuh, 4 polisi Filipina terbunuh
	Pembunuhan	6	24
	Pertempuran Marawi	5 bulan	978 militan terbunuh

Sumber: diolah dari berbagai sumber dengan detail di lampiran tabel

Keuntungan yang lebih banyak diperoleh dari aktivitas perompakan mendorong KAS semakin intens dalam menjalankan aksinya di tengah perburuan oleh kepolisian Filipina dan kegiatan patroli gabungan. Periode peningkatan aksi MGW KAS oleh peneliti dimulai tahun 2012 karena bersamaan dengan disahkannya *Framework* perjanjian antara MILF dengan pemerintahan Filipina pada 7 Oktober 2012 (Strachan, 2015: 5). Penyerangan KAS yang berkali-kali sukses pada tahun 2012 menunjukkan bahwa selain mereka bersikeras menolak untuk disahkannya BAR oleh MILF dan Pemerintah Filipina, KAS juga menunjukkan bahwa mereka akan terus melancarkan ancaman dan serangan meskipun berbagai usaha perdamaian telah dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Dari berbagai sumber yang memberitakan aktivitas KAS di tahun 2013, hanya diperoleh dua insiden krusial. Dua insiden yang salah satunya menyebutkan kegagalan KAS dalam menawan korban namun berhasil membunuh korban lain, memperlihatkan bahwa tujuan utama KAS adalah mendapatkan uang melalui

tawanan. Pembunuhan oleh KAS tidak menjadi fokus utama dalam aksinya, penculikan yang mereka lakukan namun digagalkan oleh militer Filipina adalah tujuan utama, dan mereka menilai operasi tersebut sebagai sebuah kegagalan.

Serangan pada tahun 2014 didominasi oleh penyanderaan, namun korban terbanyak ada pada aksi pembunuhan. Selain peningkatan pada aktivitas penyanderaan, pertukaran informasi dengan kelompok militan lain juga kerap dilaporkan di tahun 2014. Aktivitas pembunuhan sandera mulai aktif sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, militer Filipina mulai sering merespon dan melakukan negosiasi pasca terjadinya penculikan, sehingga KAS didesak dengan keterbatasan waktu serta tempat untuk menyembunyikan para sandera. Dari uraian aktivitas KAS tahun 2015 dapat dipahami bahwa intensitas KAS meningkat dalam hal permintaan tebusan, bahkan tidak segan membunuh sandernya ketika permintaan tebusan tidak dipenuhi. Ciri khas KAS lainnya yang ditunjukkan di tahun tersebut adalah aksi kriminal yang tetap mereka lakukan meski setelah dikepung dan diserang oleh kekuatan bersenjata Filipina. Pada tahun 2016 ketika Maphilindo mulai menyatakan ketergabungannya dalam SSSP secara sah, aktivitas KAS yang dilaporkan oleh media semakin masif. Di awal tahun, yakni bulan Januari dan Februari penangkapan terhadap anggota KAS marak diberitakan oleh media (garcia, 2016). Aksi KAS di tahun 2017 lebih fokus untuk mempertahankan diri utamanya dari pertempuran Marawi yang membuatnya mengalami kejatuhan korban dalam jumlah besar. Aksi penyanderaan kemudian beralih ke aksi perompakan yang meningkat di tahun 2017. Menurut laporan ReCAAP, penyanderaan berkurang menjadi hanya tiga insiden di 2017.

### **Keterbatasan Kerjasama Melawan Perompakan sebagai Strategi Pertahanan Kelompok Abu Sayyaf**

Faktor keterbatasan dari kerjasama melawan perompakan kebanyakan didominasi dengan konflik perbatasan yang mencakup masalah kedaulatan masing-masing negara. Contoh kasus yang pertama adalah konflik Laut Cina Selatan. Dalam konflik tersebut, Maphilindo harus mengerahkan kekuatan keamanan lautnya guna mengamankan teritorinya yang berada dalam konflik tersebut. Fokus masing-masing negara secara otomatis terpecah dalam melawan perompakan ke perebutan klaim wilayah. Penjagaan wilayah kemudian tidak hanya dilakukan antar negara Asia Tenggara, aktor luar seperti AS juga turut campur dalam konflik tersebut. Sebagai hasilnya, AS yang menyatakan bersedia memberikan bantuan dana sebesar US\$ 425 juta dalam program RMSI-nya untuk menumpas kriminalitas maritim dicurigai membawa kepentingan AS dalam menguasai konflik Laut Cina Selatan tersebut (Hastings, 2017: 8). Kerjasama yang hanya dijalankan setengah-setengah tersebut tentu dimanfaatkan oleh KAS untuk mencari informasi mengenai waktu ketika penjagaan mulai lengah dengan melakukan latihan ataupun penandaan tempat-tempat yang memudahkan mereka untuk bersembunyi saat menghadapi pengejaran oleh patroli laut. Tensi antar ketiga negara dengan aktor luar yang harusnya mereka percayai untuk membantu malah mengakibatkan tidak maksimalnya kerjasama patroli maupun operasi bersama dan memberikan kesempatan kepada KAS untuk meningkatkan strategi adaptasinya.

Konflik berikutnya adalah konflik perbatasan antara Indonesia, Filipina dan Malaysia. Masalah perbatasan antar ketiga negara tersebut bukanlah hal yang baru, terutama antara Indonesia dengan Malaysia yang memuncak di era Presiden Soekarno. Sejarah wilayah kedaulatan yang tidak begitu baik antara ketiga negara tersebut menuntun pada ketidakefektifan masalah yang mereka bahas. Kemudian konflik Sabah antara Filipina dengan Malaysia yang juga bernasib sama dengan

penyelesaian konflik masalah perbatasan lainnya. Faktor berikutnya yang memecah fokus kerjasama melawan perompakan adalah isu perompakan di Selat Malaka. Indonesia dan Malaysia yang secara bersamaan juga masih menjalankan MSP, harus mengerahkan usaha lebih untuk mengatasi perompakan di dua titik berbeda. Indonesia khususnya memiliki tantangan dalam hal teritori, yakni kedua titik perompakan sama-sama jauh dari pusat pemerintahan, dan dua titik tersebut jaraknya antar satu tempat dengan lainnya sangatlah jauh. Selat Malaka yang belum aman sepenuhnya dari perompakan memaksa Malaysia dan Indonesia membentuk satuan angkatan laut dan udara pada tahun 2015 sebagai respon cepat terhadap perompakan yang masih terjadi di Selat Malaka (Storey, 2016: 10).

Isu kedaulatan yang sangat sensitif di lingkup Asia Tenggara juga berkaitan pada respon negara-negara Maphilindo terhadap bantuan dari luar negeri. Respon yang berbeda-beda dari ketiga negara memberikan dampak pada tidak efektifnya bantuan yang sudah diberikan oleh aktor luar seperti AS dan Jepang. Filipina yang memang sebelum Duterte sudah menjalin hubungan kemiliteran yang baik dengan AS tidak segan ketika AS menurunkan pasukannya untuk membantu kepolisian Filipina dalam memberantas KAS dan kelompok militan lainnya di Filipina Selatan. Berbeda dengan Malaysia dan Indonesia, kedua negara tersebut merespon bantuan luar negeri dengan sangat selektif, sebagai contoh pendirian ReCAAP-ISC. Indonesia hingga sekarang belum menandatangani pengesahan pembentukan ReCAAP karena pusat operasinya yang difokuskan di Singapura (The Jakarta Post, 2016).

Laut Sulawesi-Sulu yang dua kali lebih luas dari Selat Malaka, yakni 337.962 dengan 143.000 kilometer persegi memberikan medan yang lebih luas bagi perompak dalam mengeksplorasi wilayah baru ketika diserang di wilayahnya dan medan yang lebih luas pula untuk patroli keamanan menjaga perairan tersebut (Ikram, 2018: 9). Dari perbandingan tersebut jelas bahwa sumber daya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasi SSSP akan lebih besar daripada program MSP. Penerapan program SSSP secara rasional harus dua kali di atas MSP agar setidaknya memenuhi syarat tingkat efektifitas operasional dan pendanaan. Indonesia dan Malaysia yang hingga saat ini masih harus fokus kepada perkembangan MSP tentu mengalami banyak kendala dalam mengerahkan kekuatannya. Merespon hal tersebut, SSSP tidak menutup bantuan dari luar baik berupa dana, pelatihan, ataupun peralatan. Lebih jauh lagi, Laut Sulawesi-Sulu berada cukup jauh dari pusat pemerintahan ketiga negara, yakni Manila, Kuala Lumpur, dan Jakarta. Hal tersebut berdampak pada penambahan dana negara untuk membangun basis keamanan dan pengawasan yang jauh dari pusat negara (Hastings, 2017: 5).

### **Kesimpulan**

Hal pertama yang menjadi penyebab meningkatnya aksi KAS di tengah kerjasama melawan perompakan adalah latar belakang KAS. Dua hal yang melanggengkan eksistensi KAS di perairan selatan Filipina adalah konflik yang berkepanjangan dan globalisasi. Konflik yang berkepanjangan sendiri didasari oleh tiga hal, yakni basis ideologi KAS, praktik SE dan keterlibatan elit politik dalam aksi-aksi KAS. Faktor kedua sebagai pendorong peningkatan aksi KAS adalah globalisasi. Melalui globalisasi, KAS melakukan berbagai model pembelajaran untuk mengikuti berbagai perkembangan informasi. Penyebab peningkatan aksi KAS berikutnya adalah Konflik antar ketiga negara yang menjadi halangan utama untuk efektifnya kerjasama yang dilakukan tersebut. Aksi KAS dari tahun 2012-2017 selain mengalami peningkatan jumlah penyerangan, juga mengalami perubahan tipe penyerangan dan wilayahnya. Sebagaimana yang dijelaskan pada bab dua, bahwa jumlah serangan



KAS yang sangat signifikan terjadi di tahun 2016. Pada tahun 2016, peningkatan aksi sejajar dengan banyaknya pertemuan Maphilindo dalam mengesahkan SSSP. Perubahan tipe penyerangan KAS terbagi dalam dua kategori, pertama yakni penyanderaan yang marak di tahun 2012-2016, pembunuhan sandera dan pertahanan diri terhadap tekanan militer di tahun 2016-2017, serta perompakan pada tahun 2017. Tipe penyerangan KAS hingga tahun 2016 cenderung sama, yakni didominasi penyanderaan dan pembunuhan sandera yang dilakukan ketika tebusan tidak dibayarkan atau pasca adanya tekanan dari militer. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerjasama melawan perompakan tidak mendapatkan respon dari KAS sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2017, KAS mengalami keguguran dalam jumlah masif akibat pertempuran Marawi. Namun, peristiwa tersebut ternyata tidak mengurangi kriminalitas di perairan Filipina. Laporan ReCAAP pada tahun 2017 menyatakan bahwa perompakan di wilayah Batangas dan Manila semakin meningkat. Peneliti meyakini, bahwa selama pemerintah Filipina belum memastikan ketiadaan KAS di Filipina, maka aksi perompakan di Batangas dan Manila merupakan respon dari kelompok militan untuk bertahan diri pasca Pertempuran Marawi. Pada akhirnya, pasti terdapat kelalaian dan kesalahan peneliti dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran dalam menganalisis lebih jauh dan lebih dalam penelitian ini lagi sangatlah terbuka kedepannya.

### Daftar Pustaka

#### Artikel Jurnal Online

- Banlaoi, Rommel C. 2005. "Maritime Terrorism in Southeast Asia: The Abu Sayyaf Threat", *Naval War College Review: Vol. 58: No. 4*, 67-70.
- \_\_\_\_\_. 2008. "Al-Harakatul Islamiyyah Essays on the Abu Sayyaf Group", Quezon City, Philippines: Philippine Institute for Political Violence and Terrorism Research (PIPVTR), 65.
- Febriana, Senia. 2014. "Securing the Sulu-Sulawesi Seas from Maritime Terrorism: a Troublesome Cooperation?", *Terrorism Research Initiative*, 67-72.
- Garcia, Bong. 2016. "3 killed in Abu Sayyaf, MNLF clash in Sulu, Newsletter Philippines, 20 Februari 2016, [Daring]. Pada <https://www.sunstar.com.ph/article/59223/>. (Diakses 16 Maret 2016).
- Gerdes, Luke M, et al. 2014 "Assessing the Abu Sayyaf Group's Strategic and Learning Capacities". *Routledge: University of Liverpool*, 273-83.
- Hastings, Justin V. 2017. "The Return of Violent Maritime Organizations to Southeast Asia", *Paper on International Studies Association, International Conference*, Hong Kong, 5-8.
- Heydarian, Richards Javad. 2015. "The Quest for Peace: The Aquino Administration's Peace Negotiations with the MILF and CPP-NPA-NDF". *Norwegian Peacebuilding Resource Centre Report*, 5.
- Ikram, Hadyu. 2018. "Sulu-Sulawesi Seas Patrol: Lessons from the Malacca Straits Patrol and Other Similar Cooperative Frameworks", *The International Journal of Marine and Coastal Law*, 9.
- Moller, Bjorn. 2009. "Piracy, Maritime Terrorism and Naval Strategy", *Danish Institute for International Studies*, 12.

Solari, Andres H Caceras. 2008. "Indonesia, Malaysia and the Philippines Security Cooperation in the Celebes Sea". *Thesis, Monterey California: Naval Post-Graduate School*.

Strachan, Anna Louise. 2015. "Conflict Analysis of Muslim Mindanao", *United Kingdom: University of Birmingham*, 5-19.

Storey, Ian. 2016. "Adressing the Persostent Problem of Piracy and Sea Robbery in Southeast Asia", *Yusof Ishak Institute*, 10.

### **Situs Resmi**

International Alert. 2014. "Bangsa Moro Conflict Monitoring System Report". Quezon City: International Alert.

### **Media Online**

BBC Indonesia. 2017. "Laut Sulu merupakan perairan 'paling berbahaya' di dunia", BBC Indonesia, 1 April 2017. [Daring]. Dalam <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39451746> (diakses 15 Maret 2018).

The jakarta Post. 2016. "Indonesia called on to join ReCAAP in combating piracy", 15 September 2016, [daring]. Dalam <https://www-thejakartapost-com.cdn.ampproject.org/v/s/news/2016/09/15/indonesia-called-on-to-join-recaap-in-combating-piracy.html>. (Diakses 16 April 2019).